



LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kota Semarang
Tahun 2025

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) KOTA SEMARANG**

Jl. Brigjend Sudiarto KM.11 (Kompleks Terminal Penggaron) Kota Semarang
Telp. (024) 6730356 Fax. (024) 6730212



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

INSPEKTORAT

Jalan Pemuda No. 148, Sekayu, Semarang Tengah, Semarang 50132
Telepon (024) 3540129 – 3513366 pe. 1239/1293 Fax (024) 3542522

Semarang, 4 Maret 2026

Nomor : 045.2 / 692 / Rhs
Lampiran :
Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Perangkat Daerah Kota
Semarang Tahun 2025

Yth.

1. Kepala Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
2. Camat di lingkungan Pemerintah Kota Semarang
di Semarang

Dasar : Surat Perintah Tugas Inspektur Kota Semarang Nomor: 700/33-37/2026
tanggal 2 Februari 2026.

Sehubungan hal tersebut, Inspektorat Kota Semarang telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2025. Reviu dilaksanakan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas. Berdasarkan hasil reviu, dapat disimpulkan bahwa substansi informasi dan capaian angka kinerja yang dimuat dalam LKjIP menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah Kota Semarang.

Untuk lebih jelasnya terlampir kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2025

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur,


Dr. Sumardi, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda/IV-c
NIP. 196708171988031001

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Kota Semarang Tahun 2025 wajib dilaksanakan sesuai amanat Impres Nomor 7 Tahun 1999. LKjIP ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kota Semarang Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Semarang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Kota Semarang Tahun 2024 pada dasarnya merupakan gambaran dari hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan masih banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh BPBD Kota Semarang dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Tugas dan tanggung jawab tersebut akan terus diupayakan untuk dapat selalu dilaksanakan di tahun-tahun yang akan datang dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta kinerja dari seluruh pegawai di lingkungan BPBD Kota Semarang. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

19 Februari 2026,

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Semarang



Drs. Erto Pudyarto Martantono, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2026

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Kota Semarang berisikan informasi-informasi pengelolaan (manajemen) kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja BPBD Kota Semarang telah ditetapkan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator dan target yang akan dicapai pada tahun 2025, yang telah menggunakan nomenklatur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja, BPBD Kota Semarang akan menyajikan informasi mengenai pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut selama tahun 2025, disertai realisasi indikator kinerja, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dengan dilengkapi realisasi dan capaian keuangan. Selanjutnya diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja serta sebagai motivasi untuk perbaikan pada tahun-tahun mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.	1
B. GAMBARAN UMUM	1
C. PEMASALAHAN UTAMA.....	5
D. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	7
A. RENCANA STRATEGIS.....	7
B. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	7
C. SASARAN STRATEGIS, PROGRAM DAN KEGIATAN	9
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	15
B. REALISASI ANGGARAN	26
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	18
BAB IV PENUTUP.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama dari instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Kota Semarang ada beberapa aspek pendukung lainnya yang meliputi (a) Aspek keuangan ; (b) Aspek SDM; (c) Aspek sarana dan prasarana, dan (d) Metode kerja, pengendalian manajemen, dan kebijaksanaan lain yang mendukung pelaksanaan tugas utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Kota Semarang

Sebagaimana diketahui bersama bahwa akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Tap MPR RI nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 , yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025diarahkan untuk menggambarkan kemampuan instansi dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan introspeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat/ pimpinan instansi. Disamping itu penyusunan LKjIP dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi, misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Kota Semarang pada akhir tahun anggaran atau pada saat penyusunan laporan.

B. GAMBARAN UMUM

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan otonomi daerah di bidang bencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan kegiatan operasional dan usaha penanggulangan bencana;
- 2) Pelaksanaan kegiatan operasional pertolongan pertama akibat bencana termasuk pula

- pelaksanaan pelayanan penyelamatan masyarakat;
- 3) Pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan teknik dan operasional terhadap unit - unit Penanggulangan bencana, instansi pemerintah swasta dan masyarakat di bidang usaha pencegahan penanggulangan bencana;
 - 4) Pelaksanaan peningkatan keterampilan tenaga sukarelawan dan bekerjasama dengan instansi lain yang terkait di dalam penanggulangan bencana;
 - 5) Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Badan

Secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

b. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah terdiri dari:

- a. Ketua yang dijabat oleh kepala badan, dan
- b. Anggota yang berasal dari:
 - a) lembaga/instansi pemerintah daerah yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana.
 - b) masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah.

c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:

- 1) Kepala Pelaksana
- 2) Sekretariat,

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan tugas dan fungsi urusan umum dan kepegawaian.
 - b) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan menyelenggarakan tugas dan fungsi urusan keuangan.
 - c) Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi

Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan tugas dan fungsi urusan perencanaan dan evaluasi.
- 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari 2 Sub Koordinator yaitu:

a) Sub Koordinator Pencegahan Bencana

Sub Koordinator Pencegahan Bencana menjalankan tugas dan fungsi menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan pencegahan dan mitigasi bencana.

b) Sub Koordinator Kesiapsiagaan

Sub Koordinator Kesiapsiagaan mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat.

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dan logistik. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari 2 Sub Koordinator yaitu:

a) Sub Koordinator Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana

Sub Koordinator Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan dan mengoordinasikan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana.

b) Sub Koordinator Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana

Sub Koordinator Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan dan mengoordinasikan penanganan pengungsi dan penyediaan logistik penanggulangan bencana.

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan rehabilitasi dan rekonstruksi. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari 2 Sub Koordinator yaitu:

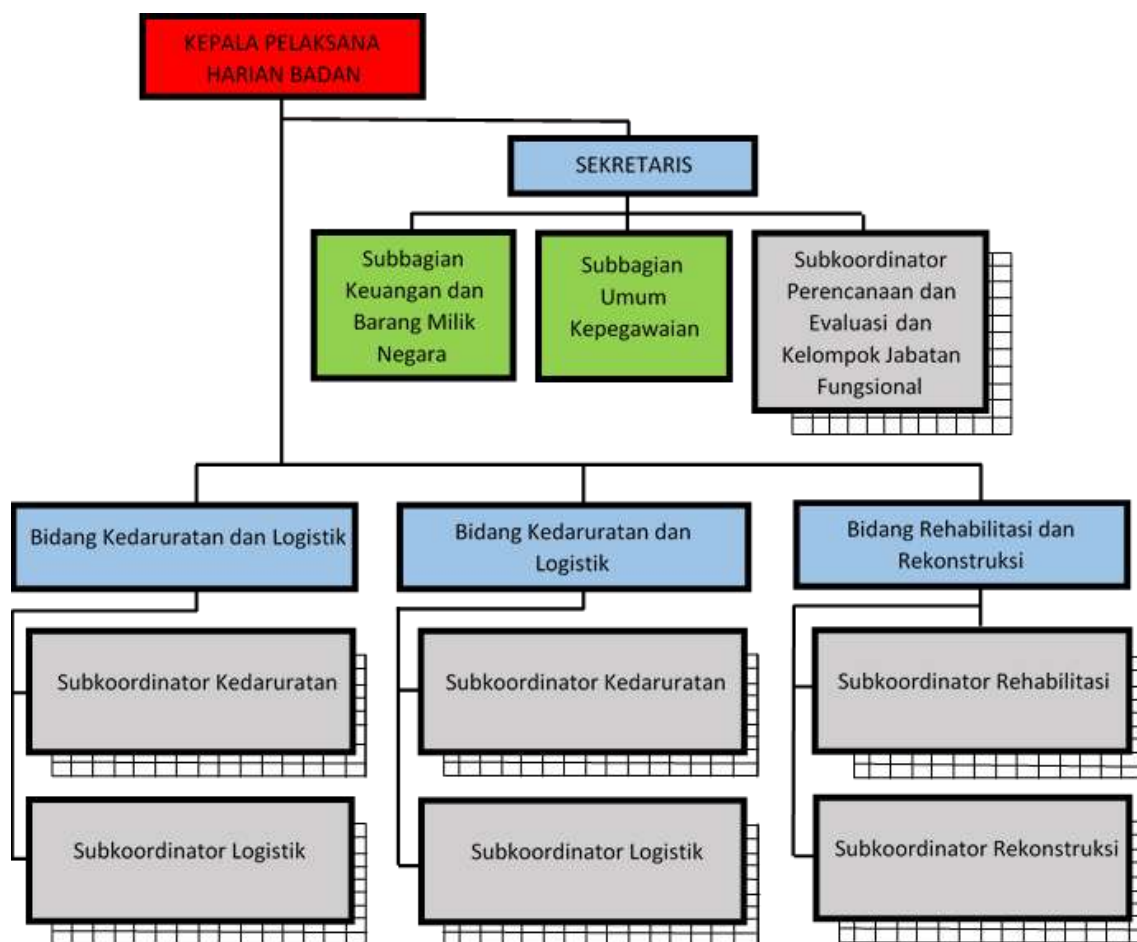
a) Sub Koordinator Rehabilitasi

Sub Koordinator Rehabilitasi mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan dan mengoordinasikan rehabilitasi.

b) Sub Koordinator Rekonstruksi

Sub Koordinator Rekonstruksi mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan dan mengoordinasikan rekonstruksi

STRUKTUR ORGANISASI BPBD KOTA SEMARANG



Sumber : BPBD Kota Semarang

3. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian BPBD Kota Semarang pada Desember 2025 menunjukkan bahwa jumlah personil BPBD Kota Semarang sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 75 pegawai, yang terdiri dari 60 pegawai laki-laki (80%) dan 15 pegawai perempuan (20%)

1. Jabatan struktural eselon II sebanyak : 1 orang
2. Jabatan struktural eselon III sebanyak : 4 orang
3. Jabatan struktural eselon IV sebanyak : 5 orang
4. Staf sebanyak 65 orang

5. Keuangan

Dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 BPBD Kota Semarang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 13.866.482.694,23 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 12.600.220.914,23 dan belanja modal sebesar Rp. 1.266.261.780,00. Anggaran yang disediakan ini diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.x`

C. PERMASALAHAN UTAMA

Dengan memperhatikan permasalahan bencana saat ini dan isu yang berkembang nampaknya diperlukan suatu paradigma baru dalam kelembagaan atau unit Pusdalops. Salah satu realisasi dari nafas paradigma baru adalah perubahan orientasi visi dan misi. Sebagai masukan dalam menentukan visi adalah adanya kenyataan bahwa Pusdalops mencakup aspek pencegahan, penanggulangan dan pembinaan/ penyuluhan kepada masyarakat. Sasarannya adalah *emergency* dan *rescue* serta rehabilitasi.

Realisasi lainnya adalah peningkatan peran Pusdalops dan peningkatan institusinya sehingga perlu dibuat unit pengurangan bencana menuju masyarakat Kota Semarang yang tangguh bencana yang diwujudkan melalui Kelurahan Tangguh Bencana (Katana) serta membentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dimana seluruh elemen masyarakat, badan usaha serta instansi pemerintahan yang terkait dengan kebencanaan dapat saling sinergi dalam mewujudkan Kota Semarang yang tangguh terhadap bencana.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Mendasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang tertuang dalam Lampiran 2 Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Kota Semarang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi BPBD Kota Semarang, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi BPBD Kota Semarang. Sub bahasan mencakup Latar Belakang Penyusunan, Gambaran Umum, Permasalahan Utama, serta Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja BPBD Kota Semarang.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Capaian Kinerja, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan, serta Prestasi yang diraih BPBD Kota Semarang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LKjIP BPBD Kota Semarang Tahun 2025 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Semarang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra BPBD Kota Semarang harus sejalan dengan pencapaian visi - misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Semarang.

Adapun visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”**, dimana untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- Misi 1 Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial
- Misi 2 Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila
- Misi 3 Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan
- Misi 4 Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Kemajuan Kota
- Misi 5 Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

BPBD Kota Semarang telah menyusun Renstra Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Pada Renstra BPBD Kota Semarang tersebut telah ditetapkan tujuan utama BPBD Kota Semarang, yaitu mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

B. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan, ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis. Pernyataan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasarannya adalah menciptakan rasa aman, ketentraman, tertib, teratur dengan dilandasi dengan kesadaran tinggi, menuju berlangsungnya seluruh aktifitas pembangunan dan melindungi hasil pembangunan/ aset Pemerintah Kota Semarang baik sebelum (pra), sedang berlangsung maupun pasca pembangunan. Dalam suasana iklim politik yang secara nasional cenderung menghangat namun kondisi keamanan dan kewaspadaan perlu kita tingkatkan, walaupun kejadian kasus bencana ada yang bias dan tidak dapat diprediksi sehingga kejadiannya mengalami pasang surut, untuk itu sasaran yang akan dicapai adalah terlaksananya pengaturan, pengawasan, pembinaan teknis terhadap usaha pencegahan dan penanggulangan bencana.

Tabel 2.1
Matriks Tujuan, Sasaran, Beserta Indikator dan Target Kinerja
BPBD Kota Semarang Tahun 2021-2026

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
TUJUAN : Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana		Menurunnya Indeks Resiko Bencana Kota Semarang	nilai	115,52	115	113	111	109	107	105	105
	SASARAN 1 : Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal	%	NA	NA	100	100	100	100%	100	100%
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	NA	100	100	100	100	100	100	100%
	SASARAN 2 : Meningkatnya upaya penanganan saat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100%
	SASARAN 3: Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	nilai	73.96	73.96	71	72	73	74	75	75

C. SASARAN STRATEGIS, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanan - kerawanan sosial, politik, ekonomi, dan bencana yang dapat meresahkan masyarakat dengan cara meningkatkan kewaspadaan dan penanganan bencana, sehingga aset/ angka kerugian dapat ditekan sekecil mungkin dan aset yang dapat terselamatkan dapat meningkat.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada tahun 2025 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan
BPBD Kota Semarang

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/ kota
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/ kota
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana kabupaten/ kota
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
		Koordinasi penanganan Pascabencana kabupaten/ kota
		Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber : DPPA 2025 BPBD Kota Semarang

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai dasar penilaian dalam pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang telah menetapkan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
BPBD Kota Semarang Tahun 2021-2026

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
TUJUAN : Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana		Menurunnya Indeks Resiko Bencana Kota Semarang	nilai	115,52	115	113	111	109	107	105	105
1	SASARAN 1 : Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal	%	NA	NA	100	100	100	100%	100	100%
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	NA	100	100	100	100	100	100	100%
2	SASARAN 2 : Meningkatkan upaya penanganan saat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100%
3	SASARAN 3: Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	nilai	73.96	73.96	73,12	73,12	73,12	73,5	74	74

Selanjutnya pada tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang juga telah menetapkan Perjanjian Kinerja, yang kemudian diubah dengan

Perubahan Perjanjian Kinerja, yang merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, serta dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang kepada pimpinan yang lebih rendah secara berjenjang untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja menyajikan indikator kinerja yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Perjanjian Kinerja disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan serta mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja.

Adapun indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis yang termuat dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada Tahun 2025 pada tataran Eselon II (Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja OPD

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal	100%
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
2.	Meningkatnya upaya penanganan saat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
3.	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	73,5

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 10.322.794.270,59	APBD
2.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 3.543.688.423,64	APBD
	JUMLAH	Rp. 13.866.482.694,23	-

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut kemudian ditetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 pada tataran Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan Eselon IV (Kepala Sub Bagian) serta Sub Koordinator.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja dan targetnya sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Matriks Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Indikator dan Target Kinerja
pada Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Semarang Tahun 2025
(Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV)

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD	100%
	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	100%
	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran BPBD	100%
	Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang/ bulan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sumber Daya Manusia	100%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1000 paket
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1000 laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dokumen
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	20%
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi	500 orang
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 dokumen
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	500 orang

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) Kota Semarang , dokumen Rencana Kontijensi dan dokumen kegiatan	3 dokumen
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1 kawasan
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	5 dokumen
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	5 unit
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4 kawasan
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Pendampingan Bantuan Sosial	12 dokumen
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	100 orang
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya data kejadian bencana, penyelamatan dan bantuan terhadap korban bencana	12 dokumen
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1255 orang
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1255 orang
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya pelatihan Jitu Pasna dan Monev kebencanaan	100 orang
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pelatihan Jitu Pasna dan Monev kebencanaan	12 kegiatan
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang menjadi tolok ukur kemampuan dan kesinambungan organisasi dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi. Hasil yang dicapai menjadi media evaluasi yang efektif untuk perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

Pengukuran kinerja menjadi dasar penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Berikut rumusan indikator sasaran yang diukur dengan indikator:

- 1) Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal;
- 2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- 3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

Tabel 3.1
Rumusan indikator dan formulasi perhitungan

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Indikator Sasaran	Target kinerja sasaran		
				2024	2025	2026
1	Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal	Jumlah dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah atau legal/ jumlah dokumen kebencanaan yang tersedia x 100	100%	100%	100%
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana / Jumlah seluruh warga negara yang mengikuti layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana x 100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya upaya penanganan saat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan	Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana / Jumlah seluruh warga	100%	100%	100%

		evakuasi korban bencana	negara yang menjadi korban bencana x 100%			
3	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai AKIP OPD atas capaian 4 komponen SAKIP berdasarkan LHE yang diterbitkan oleh Inspektorat	73,12	73.50	74

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target indikator kinerja, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capaiannya

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin rendah capaiannya

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja yang diperoleh dari hasil pengukuran kinerja tersebut kemudian dikelompokkan dalam skala nilai peringkat capaian kinerja, dengan mengadopsi peringkat kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
$90 < x \leq 100$	Sangat Tinggi
$75 < x \leq 90$	Tinggi
$65 < x \leq 75$	Sedang
$50 < x \leq 65$	Rendah
$X \leq 50$	Sangat Rendah

Sedangkan dalam pengukuran penilaian AKIP, terdapat 7 kategori nilai AKIP yaitu:

Tabel 3.3

Skala Nilai AKIP

Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi
AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
A	> 80 - 90	Memuaskan
BB	> 70 - 80	Sangat Baik
B	> 60 - 70	Baik
CC	> 50 - 60	Cukup (Memadai)
C	> 30 - 50	Kurang
D	> 0 - 30	Sangat Kurang

Indikator Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal di Kota Semarang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada tahun 2025, mencapai 100% dari target 100% yang berarti dokumen kebencanaan telah tersedia dan dapat digunakan sebagai acuan kebencanaan di Kota Semarang. Sesuai dengan skala peringkat kerja maka capaian penyelesaian dokumen kebencanaan di Kota Semarang Tahun 2025 termasuk dalam kriteria sangat tinggi ($91 < 100$).

Target Indikator Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada tahun 2025 adalah 100% dan capaiannya adalah 100% yang berarti warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana telah diakomodir. Sesuai dengan skala peringkat kerja maka capaian warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di Kota Semarang Tahun 2025 termasuk dalam kriteria sangat tinggi ($91 < 100$).

Target indikator persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana tahun 2025 adalah 100%, sedangkan realisasinya 100%, yang berarti seluruh warga negara di Kota Semarang yang menjadi korban bencana telah berhasil ditangani. Sesuai dengan skala peringkat kerja maka capaian warga negara yang memperoleh layanan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kota Semarang Tahun 2025 termasuk dalam kriteria sangat tinggi ($91 < 100$).

Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 adalah 73,5 (BB) , sedangkan Hasil penilaian mandiri AKIP oleh Inspektorat Kota Semarang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang termasuk dalam kriteria Sangat Baik (72,70/BB), hal ini mengalami tidak tercapai dari target yang ditentukan, maka perhitungan capaian kinerjanya 93.98%. Sehingga dapat dilihat capaian kinerja tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Formula Indikator Sasaran	Capaian	
					Realisasi	%
1	Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal	100%	Jumlah dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah atau legal/ jumlah dokumen kebencanaan yang tersedia x 100	100%	100
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	100%	Jumlah warga negara yang mengikuti layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap	100%	100

		kesiapsiagaan terhadap bencana		bencana / Jumlah seluruh warga negara yang mengikuti layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana x 100%		
2	Meningkatnya upaya penanganan saat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana / Jumlah seluruh warga negara yang menjadi korban bencana x 100%	100%	100
3	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	73,5	Nilai AKIP OPD atas capaian 4 komponen SAKIP berdasarkan LHE yang diterbitkan oleh Inspektorat	72,7 (BB)	98.91

Adapun dari masing-masing formula indikator sasaran dibuat rumus pengukurannya. Rumus perhitungan dan hasil perhitungan masing formula indikator serta tingkat capaian terhadap target dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5

Perhitungan Kinerja berdasarkan Formulasi Indikator Capaian Tahun 2025

No.	Indikator Sasaran	Formula Indikator Sasaran	Perhitungan Capaian	Capaian
1	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal	Jumlah dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah atau legal/ jumlah dokumen kebencanaan yang tersedia x 100	$\frac{1 \text{ dokumen}}{1 \text{ dokumen}} \times 100\%$	100%
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana / Jumlah seluruh warga negara yang mengikuti layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana x 100%	$\frac{80}{80} \times 100\%$	100%
2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana / Jumlah seluruh warga negara yang menjadi korban bencana x 100%	$\frac{1527}{1527} \times 100\%$	100%
3	Nilai AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai AKIP OPD atas capaian 4 komponen SAKIP berdasarkan LHE yang diterbitkan oleh Inspektorat		72,7 (BB)

Dari perhitungan diatas terlihat bahwa mitigasi, penyelamatan dan evakuasi di Kota Semarang telah terlaksana 100%, hal ini ditinjau dari tersedianya dokumen kebencanaan, warga negara yang mengikuti layanan pencegahan dan kesiapsiagaan dan warga negara yang berhasil di selamatkan dan evakuasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Semarang. Jika dibanding dengan target yang harus dicapai sebesar 100% maka pelaksanaan kebencanaan di Kota Semarang telah berhasil dilaksanakan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang belum mencapai target atas Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2025 yaitu sebesar 72,70 dari target 73.50. Nilai ini berdasarkan penilaian Inspektorat Kota Semarang.

Sumber : <https://penilaian.e-sakip.semarangkota.go.id/score>

Target Nilai AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang tahun 2025 adalah 73,5 (>70-80/BB), sedangkan Hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang adalah sebesar BB (72,7) maka perhitungan capaian kinerjanya adalah 72,7 dibagi 73,5 dikali 100%, diperoleh capaian sebesar 98,91%.

1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis atas pencapaian kinerja menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja program dan kegiatan selama tahun 2025, sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja BPBD Kota Semarang yang dicapai pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR TUJUAN

1.1 Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana

Tingkat capaian Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana dilakukan untuk mengetahui kesiapan kota dalam menghadapi bencana.

Tabel 3.6
Tujuan OPD

Indikator Kinerja Utama		Capaian Kinerja Tahun 2025			Realisasi Tahun 2024
		Target	Realisasi	%	
Tujuan : Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana					
1	Menurunnya Indeks Resiko Bencana Kota Semarang	107	94,31	109,65%	99,41

Pada tahun 2025 indikator meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana dengan Indikator kinerjanya adalah Menurunnya Indeks Resiko Bencana Kota Semarang, dengan target pada tahun 2025 sebesar 107 dan realisasi sebesar 94,31 dengan capaian sebesar 113, 45%.

1.2 Indikator Sasaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tabel 3.7
Meningkatnya Kapasitas Mitigasi Dan Adaptasi Bencana

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2025			Realisasi Tahun 2024
		Target	Realisasi	%	
1	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal	100%	100%	100	100
2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100	100

Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal sebesar 100% yang berasal dari penyelesaian pembuatan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Kajian Risiko Bencana (KRB) dan update Peta Resiko Bencana dengan tujuan untuk Mengidentifikasi potensi bencana dan risiko yang terkait, Mengukur tingkat risiko dan dampak potensial, Mengembangkan

strategi mitigasi dan pengurangan risiko dan Meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat di Kota Semarang.

DATA DUKUNG RENCANA AKSI (TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG
TRIWULAN IV TAHUN 2025

Sasaran : Meningkatnya upaya penanganan saat bencana

RENCANA AKSI		INDIKATOR KINERJA		URAIAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SATUAN	TRIWULAN I		
NO.	URAIAN	NO.	URAIAN				TARGET	REALISASI	%
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal	Penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal	Jumlah dokumen kebencanaan yang selesai/ dokumen kebencanaan yang tersedia x 100%	%	100	100	100
		2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	(Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana)/(Jumlah warga negara yang mengikuti pelatihan)×100%	%	100	100	100

Sumber : e-sakip

Faktor Keberhasilan/ Penghambat

Dalam rangka peningkatan upaya penanganan saat bencana terdapat 1 rencana aksi yaitu Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dengan dua indikator kinerja yaitu Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal dan Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Pembuatan dokumen kebencanaan dilaksanakan dengan menggunakan tenaga ahli yang melibatkan beberapa OPD dan stakeholder untuk kelengkapan data. Dokumen yang dihasilkan adalah dokumen Kajian Risiko Bencana Bencana yang merupakan dasar perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu, terstruktur, terarah dan terukur. Dokumen Kajian Risiko Bencana memuat proses, hasil, dan analisis pengkajian risiko bencana yang meliputi bahaya, kerentanan, kapasitas, yang merupakan dasar untuk menentukan risiko bencana. Data dan peta hasil kajian risiko bencana ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana untuk 5 (lima) tahun kedepan di Kota Semarang. Pengkajian dilaksanakan untuk seluruh bencana yang berpotensi di Kota Semarang yaitu bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor serta rob. Penyusunan kajian risiko bencana yang dilakukan di Kota Semarang

mengikuti standar dan aturan yang berlaku secara nasional. Kajian risiko bencana disusun secara komprehensif dengan melibatkan instansi lintas sektoral. Hal ini dikarenakan data pendukung dalam pengkajian yang dilakukan merupakan data data yang berasal dari instansi dan lembaga yang berwenang baik di daerah maupun di nasional. Selain itu bentuk Dokumen Kajian Risiko Bencana dari segi penyajian dilakukan secara ringkas, jelas dan mudah dipahami. Kajian risiko bencana digunakan sebagai landasan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana Kota Semarang.

1.3 Indikator Sasaran Meningkatnya Upaya Penanganan Saat Bencana

Tabel 3.8

Meningkatnya upaya penanganan saat bencana

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2025			Realisasi Tahun 2024
		Target	Realisasi	%	
1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100	100

Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan realisasi 100% atau 3.056 jiwa yang terdampak bencana pada tahun 2025. Hal ini meningkat dari jumlah korban jiwa yang terdampak pada tahun 2024 sebanyak 1.527 jiwa. Peningkatan terjadi karena anomali cuaca di tahun 2025 hingga akhir tahun.

DATA DUKUNG RENCANA AKSI (TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

TRIWULAN IV TAHUN 2025

Sasaran : Meningkatnya upaya penanganan saat bencana

RENCANA AKSI		INDIKATOR KINERJA		URAIAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SATUAN	TRIWULAN I		
NO.	URAIAN	NO.	URAIAN				TARGET	REALISASI	%
1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	$\frac{\text{korban bencana yang mendapat pertolongan dan evakuasi}}{\text{jumlah seluruh korban bencana}} \times 100\%$	orang	3.056	3.056	100%

Sumber : e-sakip

Faktor Keberhasilan/ Penghambat

Faktor keberhasilan :

- Proses pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi terbantu dengan adanya relawan yang berada dilokasi kejadian sehingga prosesnya lebih cepat;
- Banyak warga disekitar lokasi kejadian bencana sudah mulai sadar terhadap ancaman bencana;

Faktor penghambat :

- Kurangnya cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi BPBD;

b) Banyaknya sarana dan prasarana yang rusak saat pelayanan;

Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebanyak 3.056 jiwa. Pelaksanaan dilaksanakan oleh 31 orang anggota pusdalops, pada tahun 2025 terdapat 418 kejadian bencana di Kota Semarang.

1.4 Indikator Nilai AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 3.9

Nilai AKIP

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2025			Capaian Kinerja Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Nilai AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	73,5	72,70	98,91	73,12	72,50	99,15

capaian target dalam Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berdasarkan tabel diatas, capaian realisasi tahun 2025 adalah sebesar 72,70 (BB) atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2024 sebesar 72,5. Hal ini berarti capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mengalami peningkatan. Berdasarkan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja, capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang tahun 2025 sebesar 72,70 (BB) memperoleh kriteria dengan tingkat capaiannya sangat baik.

2. Capaian Kinerja Berdasarkan Program

2.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Tabel. 3.10

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

No.	Indikator kinerja	Tahun 2025			Realisasi Tahun 2024
		Target	Realisasi	%	
1.	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran BPBD	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2025 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target 100%. Dengan tercapainya target tersebut bermanfaat pada lancarnya kinerja OPD dalam melaksanakan program kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Indikator Kinerja yang berhasil dicapai antara lain: tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta terpenuhinya belanja jasa penunjang administrasi perkantoran, pemeliharaan berkala gedung kantor dan kendaraan operasional dinas, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan OPD, penyusunan LKPJ, LKJIP, RENJA, RKA dan DPA OPD serta pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun.

2.2 Program Penanggulangan Bencana

Capaian kinerja program Penanggulangan Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sebagai berikut.

Tabel. 3.11

Program Penanggulangan Bencana

Indikator kinerja		Tahun 2025			Realisasi
		Target	Realisasi	%	Tahun 2024
1.	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana (EWS)	13% 3 titik	8,6% 2 titik	66,66	45.5% 7 titik

Pada tahun 2025 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana (EWS) dari yang ditargetkan 13% (3 titik) mencapai 8,6% (2 titik).

Namun pada tahun 2025 BPBD Kota Semarang hanya melaksanakan perawatan terhadap Alat EWS (Early Warning System) Banjir di 2 titik lokasi dalam wilayah Meteseh dan Mangkang Kulon, yang mana lebih sedikit dari target yang ditentukan. Hal ini terjadi karena adanya efisiensi anggaran. Perawatan akan tetap dilaksanakan secara berkala pada tahun selanjutnya karena masih ada beberapa alat yang mengalami kerusakan sehingga mengurangi kinerja EWS.

3. Perbandingan Kinerja

Untuk mengetahui capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan lingkup regional maupun nasional, diperlukan perbandingan capaian kinerja dengan kabupaten/kota lain yang memiliki indikator kinerja yang serupa.

Indikator kinerja organisasi urusan bencana di Jawa Tengah terdapat dua pilihan indikator (1) Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan (2) Indeks Risiko Bencana (IRBI). Pada BPBD Kota Semarang menggunakan IRBI yang mana perhitungannya lebih mudah karena nilai nya yang mengeluarkan dari BNPB dan daerah hanya menentukan target. Dalam penentuan target terdapat 3 indikator yaitu kerawanan, kapasitas dan bencana. Nilai IRBI diterbitkan pada bulan Februari-Maret pada tahun berikutnya.

Tabel 3.12

Perbandingan Indeks Risiko Bencana (IRBI)

Sumber data	Indeks Risiko Bencana (IRBI)					Kategori Risiko Bencana
	2021	2022	2023	2024	2025	
1	3	4	5	6	6	7
Provinsi Jawa tengah	132,99	125,73	115,38	109,01	99,61	sedang
Kota Semarang	115,52	108,63	103,49	99,41	94,31	sedang
Kabupaten Kendal	98,97	100,4	97,90	91,74	86,54	sedang

Berdasarkan tabel Indeks Risiko Bencana (IRBI) Tahun 2021–2025 diatas, Kota Semarang menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari 115,52 pada 2021 menjadi 94,31 pada 2025 dan tetap berada pada kategori risiko “sedang”. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, nilai IRBI Kota Semarang secara konsisten lebih rendah setiap tahunnya (Jawa Tengah turun dari 132,99 menjadi 99,61), yang menunjukkan bahwa tingkat risiko Kota Semarang relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi. Sementara itu, dibandingkan dengan Kabupaten Kendal, posisi Kota Semarang masih memiliki nilai risiko lebih tinggi pada seluruh periode (Kendal turun dari 98,97 menjadi 86,54, meskipun sempat naik pada 2022). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kota Semarang berada di posisi tengah: lebih baik dibandingkan tingkat provinsi, namun masih lebih tinggi risikonya dibandingkan Kabupaten Kendal, meskipun ketiganya sama-sama berada dalam kategori risiko sedang dan menunjukkan tren perbaikan dari tahun ke tahun.

Indikator kinerja BPBD Kota Semarang yang termasuk dalam standar nasional adalah indikator kinerja pada program kegiatan yang realisasi dan capaiannya dijabarkan pada tabel dibawah :

Tabel 3.13
Perbandingan Sasaran

No.	Indikator Kinerja	Target		Capaian
		BPBD Kota Semarang	Nasional	BPBD Kota Semarang
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%
2.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%
3.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

Tahun	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi Kinerja
2025	13.866.482.694,23	12.836.821.985	100	61,492%
2024	14.335.252.729	13.760.691.361	100	59,885%
2023	16.285.347.190	15.047.021.695	100	64,685%

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025, alokasi anggaran Rp13.866.482.694,23 dengan rincian per program sebagai berikut.

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp10.322.794.270,59,-
- Program Penanggulangan Bencana sebesar Rp3.543.688.423,64,-

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian tingkat efisiensi kinerja diperoleh dengan membandingkan antara capaian keuangan dengan capaian kinerja sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.14
skala efisiensi penggunaan sumber daya

Keterangan		
NE > 90%	:	Sangat efisien
80% < NE ≤ 90%	:	efisien
60% < NE ≤ 80%	:	Cukup efisien
50% < NE ≤ 60%	:	Kurang efisien
NE ≤ 50%	:	Tidak efisien

Tabel 3.15
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp) atau PAKi	Realisasi Anggaran atau RAKi (Rp)	Target	Realisasi	Capaian atau CKi (%)	Anggaran x Capaian	(Pagu Anggaran x Capaian)- Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6):(5)	(8) = (3) x (7)	(9) = (8)-(4)
Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal	155.590.236,00	152.629.600	100	100	100	155.590.236,00	2.960.636,00
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	979.006.313,08	928.001.981	100	100	100	979.006.313,08	51.004.332,08
Meningkatnya upaya penanganan saat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.003.556.034,56	959.237.592	100	100	100	1.003.556.034,56	44.318.442,56
TOTAL							2.138.152.584	98.283.410,64

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi) - RAKi}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$E = \frac{98.283.410,64}{2.138.152.584} \times 100\%$$

$$E = 4,597\%$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{4,597\%}{20} \times 50\right)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + (0,229832547\% \times 50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + 11,492\%$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 61,492\% \text{ (Cukup efisien)}$$

Dari tabel diatas dapat diketahui nilai efisiensi dari sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sebesar 59,885% atau kurang efisien jika dilihat dari skala efisiensi sumber daya.

Sasaran “Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana” dengan indikator kinerja “Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal” dicapai melalui kegiatan “Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota”. Persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan capaian keuangan 99,67%. Indikator kinerja “Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana” dicapai melalui kegiatan “Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana”. Persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan capaian keuangan 91,92%.

Sasaran “Meningkatnya upaya penanganan saat bencana” dengan indikator “Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana” dicapai melalui kegiatan “Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana”. Persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan capaian keuangan 92,57%. Dari Pagu Anggaran Tahun 2025 sebesar: Rp. 13.866.482.694,23,- penyerapan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 12.836.821.985,- dengan rincian per program sebagai berikut :

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)
	URUSAN WAJIB KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN UMUM	13.866.482.694,23	12.836.821.985	92,57
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	10.322.794.270,59	9.418.549.812	91,24
2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.257.771,17	27.164.000	84,21
0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.593.280,67	10.606.000	68,02

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)
0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	214.490,00	200.000	93,24
0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	440.000,00	440.000	100,00
0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	200.512,00	200.000	99,74
0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	137.274,00	130.000	94,70
0008	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	15.672.214,50	15.588.000	99,46
2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.878.429.600,40	7.094.566.139	90,05
0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.691.187.070,40	6.907.371.639	89,81
0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	187.080.000,00	187.080.000	100,00
0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	81.265,00	67.500	83,06
0006	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	81.265,00	47.000	57,84
2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.761.051,60	138.346.295	86,06
0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	19.922.816,00	19.510.450	97,93
0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.151,00	3.300.000	66,00
0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.713.238,00	28.180.280	64,47
0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.723.597,00	17.022.000	90,91
0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.735.684,10	7.557.500	86,51
0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.665.885,00	6.184.000	92,77
0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.137.440,50	50.368.065	98,50
0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.862.240,00	6.224.000	90,70
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000,00	100.000	100,00
0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000,00	100.000	100,00
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	974.064.309,42	925.284.001	94,99
0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.927.000,00	3.900.000	99,31
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	270.913.659,42	239.210.561	88,30
0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	699.223.650,00	682.173.440	97,56
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.277.181.538,00	1.233.089.377	96,55
0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	310.032.000,00	303.520.136	97,90
0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	615.101.617,00	595.237.964	96,77

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)
0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.022.664,00	43.097.350	78,33
0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	297.025.257,00	291.233.927	98,05
03	Program Penanggulangan Bencana	5.041.964.126	4.895.219.351	97,09
2.01	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	155.590.236,00	152.629.600	98,10
0103	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	155.590.236,00	152.629.600	98,10
2.02	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	979.006.313,08	928.001.981	94,79
020015	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten kota	81.027.586,00	71.841.000	88,66
020020	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	580.397.684,00	542.820.000	93,53
020026	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten Kota	23.503.672,08	23.503.593	100,00
020028	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupate Kota	294.077.371,00	289.837.388	98,56
2.03	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.003.556.034,56	959.237.592	95,58
030003	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	737.679.020,75	703.752.637	95,40
030009	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	265.877.013,81	R255.484.955	96,09
2.04	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.405.535.840,00	1.378.403.000	98,07
040010	Sub Kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	1.334.910.789,00	1.315.262.000	98,53
040010	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	70.625.051,00	63.141.000	89,40

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyelenggaraan program dan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026. Dalam pengukuran kinerja, keberhasilan yang dicapai adalah berkat kerja sama dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf, stakeholder terkait dan partisipasi masyarakat. Terhadap keberhasilan yang dicapai, diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Secara umum kesimpulan dari pencapaian indikator kinerja pada BPBD Kota Semarang pada tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) tahun 2025 sebesar 94,31% atau capaian kinerja sebesar 113,456%;
2. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana adalah 500 orang atau capaian kinerja sebesar 100%;
3. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah 245 orang atau capaian kinerja sebesar 100%;
4. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar 3056 jiwa atau capaian kinerja sebesar 100%;
5. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sebesar Rp. 13.866.482.694,23.- dengan Realisasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 12.836.821.985.- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 92,57 % terdiri dari:
 - a. Realisasi belanja operasi sebesar Rp. 12.600.220.914,23,- dengan persentase penyerapan 91,65% dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.052.088.006,23 atau 8,349%
 - b. Realisasi belanja modal sebesar Rp. 1.266.261.780 dengan persentase penyerapan 98,82% dan sisa anggaran sebesar Rp. 14.895.780,- atau 1,176%

B. SARAN

Langkah-langkah alternatif yang perlu dilakukan sebagai upaya meningkatkan kinerja dan mengatasi permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang antara lain :

1. Upaya untuk memenuhi kebutuhan SDM baik kuantitas dan kualitas masih perlu dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Dari sisi kualitas agar lebih banyak pelatihan sesuai tupoksi. Hal ini bisa dilaksanakan berkoordinasi dengan BKPP Kota Semarang;
2. Monitoring Rencana Aksi atas kinerja dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan semua pimpinan unit kerja yang ada pada BPBD;

3. Meningkatkan pelayanan masyarakat untuk mendukung tercapainya capaian indikator kinerja yang lebih optimal.
4. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas staf dalam menangani bencana. Ini dapat mencakup pelatihan keterampilan teknis, manajerial, dan kepemimpinan, serta partisipasi dalam program pertukaran pengetahuan dengan pihak lain.
5. Sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya persiapan bencana, tindakan mitigasi, dan tanggap darurat. Ini bisa dilakukan melalui kampanye sosial, pelatihan kesadaran bencana di sekolah dan komunitas, serta penggunaan media sosial dan platform komunikasi lainnya.
6. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait lainnya seperti pemerintah daerah, TNI/ Polri, relawan, LSM, dan sektor swasta. Ini dapat dilakukan melalui pertemuan rutin, forum koordinasi, dan pembentukan tim gabungan untuk tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana.
7. Peningkatan infrastruktur penanggulangan bencana di wilayahnya, termasuk pembangunan posko pengungsian yang memadai, sistem peringatan dini yang efektif, dan fasilitas evakuasi yang aman.
8. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional. Ini termasuk penggunaan sistem informasi manajemen bencana, aplikasi peringatan dini, dan penggunaan drone atau sensor untuk pemantauan bencana.
9. Penguatan kebijakan atau peraturan yang mendukung penanggulangan bencana, termasuk pengalokasian anggaran yang lebih besar, regulasi yang lebih ketat terkait pembangunan infrastruktur, dan dukungan untuk program mitigasi risiko bencana.
10. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan efektivitas langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi faktor penghambat. Pembelajaran dari pengalaman sebelumnya harus dijadikan dasar untuk meningkatkan strategi dan kebijakan di masa depan